



COREinsight

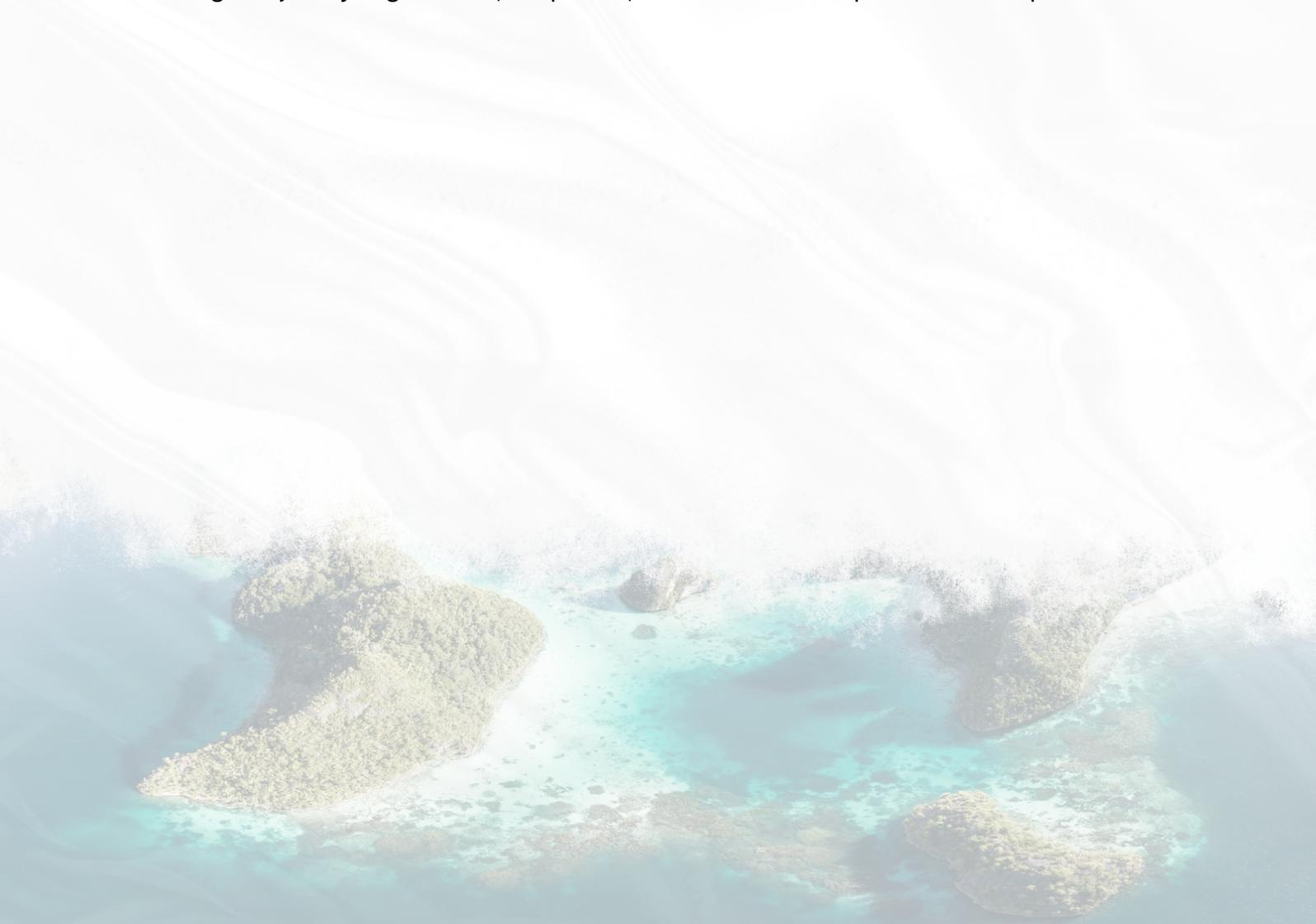
TENAGA KERJA MUDA DI PERSIMPANGAN EKONOMI INDONESIA

Kutipan

Semua konten dalam publikasi yang dikeluarkan oleh CORE Indonesia dapat dikutip secara bebas selama mencantumkan sumber

Rangkuman Utama:

- Rilis BPS pada 5 Mei 2025 tentang pengangguran kembali menegaskan pola yang konsisten dalam struktur pengangguran Indonesia: dominasi anak muda usia 15–24 tahun. Jika dicermati lebih saksama, tingginya pengangguran muda di Indonesia bukan sekadar fenomena statistik semata, melainkan juga cerminan masalah struktural dalam pasar tenaga kerja dan ekonomi sektoral nasional.
- Persoalan mendasar pengangguran muda Indonesia berakar pada carut marutnya kebijakan ekonomi sektoral. Dari sisi permintaan, serangkaian badai PHK dan terbatasnya lapangan kerja formal yang relevan dengan keterampilan anak muda adalah problem utamanya. Sementara dari pendulum penawaran, *mismatch* keterampilan yang ditawarkan anak muda adalah pangkal masalahnya.
- Kebijakan ketenagakerjaan dan ekonomi yang komprehensif mencakup reorientasi kebijakan investasi, *linkage* sektor pendidikan dan industri, dan pembangunan sektoral adalah kunci utama untuk menyelesaikan akar masalahnya.
- Penyelarasan antara pendidikan, dunia usaha, dan kebijakan pemerintah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa harmonisasi yang sistemik, Indonesia berisiko kehilangan momentum bonus demografi yang hanya datang sekali dalam sejarah. Peluang emas ini hanya akan menghasilkan dividen jika didukung oleh ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada masa depan.



Ada apa dibalik tingginya angka pengangguran usia muda?

Rilis terbaru BPS (5 Mei 2025) kembali menegaskan satu pola yang konsisten dalam struktur pengangguran Indonesia: dominasi anak muda usia 15–24 tahun. Pada Februari 2025, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) anak muda tercatat sebesar 16,16%, tiga kali lipat dari rata-rata nasional yang hanya 4,76%. Lebih dari separuh (52,64%) dari total 7,47 juta penganggur nasional adalah anak muda. Proporsi ini hampir identik dengan angka satu dekade sebelumnya (Agustus 2010), di mana 51,96% penganggur berasal dari kelompok usia yang sama.

Secara global, pengangguran muda memang cenderung lebih tinggi dibanding kelompok usia lainnya. Maka, sekilas kondisi di Indonesia terlihat "wajar". Namun, jika dibandingkan dengan negara-negara lain, tingkat pengangguran muda Indonesia tampak jauh lebih mengkhawatirkan. Estimasi ILO menyebutkan pengangguran muda Indonesia mencapai 13,1% pada 2024, lebih tinggi dari India (12,8%) dan Malaysia (12,3%), serta jauh di atas Vietnam (6,8%), Filipina (6,6%), dan Thailand (4,3%). Negara-negara Asia Tenggara tersebut relatif stabil dengan tingkat pengangguran muda rendah dalam dua dekade terakhir.

Mengapa Indonesia tertinggal? CORE Indonesia menilai bahwa tingginya pengangguran muda di Indonesia bukan sekadar fenomena statistik global, tetapi mencerminkan masalah struktural dalam pasar tenaga kerja dan ekonomi sektoral nasional. Akar persoalannya bahkan dapat ditelusuri sebelum krisis moneter 1997–1998. Pada periode 1991–1996, saat ekonomi Indonesia tumbuh pesat (rata-rata 7,25%), pengangguran muda justru naik rata-rata 15,1%. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi saat itu tidak diiringi dengan penciptaan lapangan kerja yang inklusif bagi kaum muda.

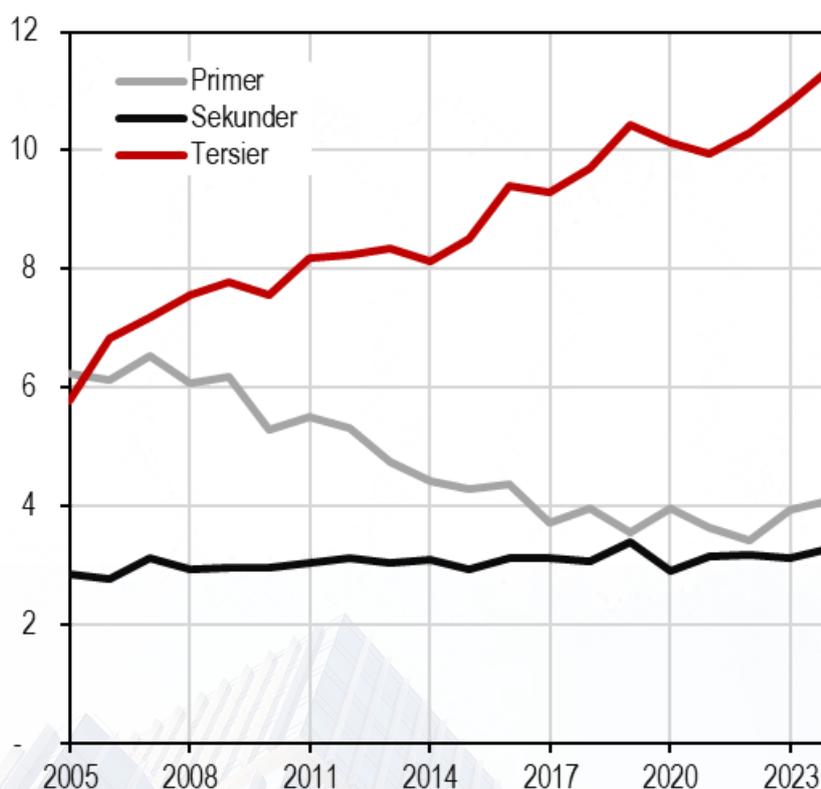


Jika dibandingkan dengan negara-negara lain, Estimasi ILO menyebutkan pengangguran muda Indonesia mencapai 13,1% pada 2024, lebih tinggi dari India (12,8%) dan Malaysia (12,3%), serta jauh di atas Vietnam (6,8%), Filipina (6,6%), dan Thailand (4,3%).

Pola tersebut terus berulang. Selama 2000–2024, ekonomi Indonesia cenderung stagnan di kisaran 5% pertumbuhan tahunan. Sayangnya, performa ini tidak cukup kuat menyerap tenaga kerja muda dalam jumlah signifikan. Alih-alih menjadi masa percepatan menuju negara maju, bonus demografi sejak 2015 justru diwarnai stagnasi pengangguran muda.

Bila tren ini tak berubah, Indonesia berisiko menghadapi paradoks demografi: kehabisan tenaga sebelum mencapai kemakmuran, *getting old before getting rich*.

Masalah struktural itu semakin nyata jika kita menilik dinamika dua dekade terakhir. Meski jumlah riil pengangguran muda menurun, kecepatannya melambat drastis pasca-2010. Dari 2005 ke 2010, jumlah anak muda yang menganggur terpangkas hingga 42%. Namun sepanjang 2011–2024, penurunannya hanya 9%. Artinya, laju perbaikan pasca-2010 tinggal seperlima dari capaian sebelumnya. Perlambatan ini beriringan dengan gejala lain yang tak kalah mencemaskan, **urbanisasi pengangguran muda**. Semakin banyak anak muda meninggalkan sektor pertanian, yang mereka nilai tak lagi menjanjikan (Kompas, 14 Mei 2025), tetapi gagal terserap sektor formal, baik di industri maupun jasa. Sebagian besar justru terperangkap dalam pekerjaan informal berupah rendah di perkotaan, yang tidak menjamin mobilitas ekonomi jangka panjang.



Grafik 1. Sektor Utama Angkatan Kerja Usia 15 –24 Tahun Bekerja

Sumber: Sakernas (diolah CORE) (berbagai tahun).

Tekanan ini kian terlihat lewat tingginya angka anak muda yang masuk kategori NEET (*not in employment, education, or training*). Pada 2023, 21,4% anak muda Indonesia termasuk NEET, lebih tinggi dari rata-rata global (20,4%) dan hampir dua kali lipat dibanding negara-negara tetangga seperti Vietnam (10,8%), Thailand (12,5%), Filipina (12,8%), dan Malaysia (10,2%). Tingginya angka NEET mencerminkan adanya kelompok anak muda yang tersisih dari sistem ekonomi dan pendidikan. Lebih dari sekadar fase transisi, status NEET kerap menjadi awal dari **scarring effect**, yakni terhambatnya karir secara permanen karena pernah terdepak dari sistem. Mereka yang pernah NEET berisiko tinggi hanya bekerja di sektor informal, dengan peluang terbatas untuk naik kelas ekonomi (Pratomo dan Manning, 2020).

Masalah ini bukan hanya milik daerah tertinggal. Di provinsi padat industri seperti Jawa Barat dan Banten, angka NEET bahkan melebihi rata-rata nasional. Pada 2023, NEET di kedua provinsi tersebut masing-masing mencapai 23,49% dan 23,79%. Ini menunjukkan bahwa pembangunan industri belum mampu menyeimbangi laju pertumbuhan angkatan kerja muda. Bahkan di daerah dengan PDB per kapita tinggi, peluang kerja layak bagi anak muda tetap terbatas. Di saat sektor pertanian melemah dan sektor industri belum inklusif, anak-anak muda dengan keterampilan terbatas kehabisan pilihan. Sektor jasa formal pun cenderung menutup pintu bagi mereka yang tak memenuhi standar keterampilan pasar.

Kombinasi ketidaksinkronan ini menimbulkan frustrasi generasi muda. Ketika pekerjaan layak terasa makin jauh dari jangkauan, sebagian dari mereka memilih migrasi tanpa persiapan atau bahkan terjebak ke dalam sektor berisiko tinggi, termasuk menjadi korban eksploitasi digital seperti admin judi online. Fenomena ini tercermin dari suara-suara yang bergema di media sosial, dengan tagar seperti **#KaburAjaDulu**, sebuah simbol kehilangan harapan dalam negeri yang semestinya memberi ruang tumbuh.

“ Ketika pekerjaan layak terasa makin jauh dari jangkauan, sebagian dari mereka memilih migrasi tanpa persiapan atau bahkan terjebak ke dalam sektor berisiko tinggi, termasuk menjadi korban eksploitasi digital seperti admin judi online. Fenomena ini tercermin dari suara-suara yang bergema di media sosial, dengan tagar seperti #KaburAjaDulu, sebuah simbol kehilangan harapan dalam negeri yang semestinya memberi ruang tumbuh. ”

Akar Masalah: Badai PHK, Kurangnya Lapangan Kerja, hingga permasalahan struktural *mismatch*

Persoalan mendasar pengangguran muda Indonesia berakar pada carut marutnya pembangunan ekonomi sektoral. Dari sisi permintaan, serangkaian badai PHK dan terbatasnya lapangan kerja formal yang relevan dengan keterampilan anak muda adalah problem utamanya. Sementara dari pendulum penawaran, *mismatch* keterampilan yang ditawarkan anak muda adalah pokok masalahnya. Sisi permintaan dan sisi penawaran ini secara bersamaan melahirkan berjibun anak muda menganggur. Pada saat yang sama, rumitnya persyaratan dan informalisasi perekrutan tenaga kerja telah menyempitkan akses anak muda di daerah untuk masuk ke pekerjaan formal di sektor manufaktur dan jasa. Perekrutan informal ini marak memunculkan calo yang akhirnya menambah biaya tidak terduga dan menyebabkan pasar tenaga kerja tidak efisien. Sistem penerimaan berdasarkan kualifikasi pun menjadi sulit diterapkan. Padahal, sistem meritokrasi dalam perekrutan tenaga kerja sangat penting untuk mendorong suplai tenaga kerja berkualitas.

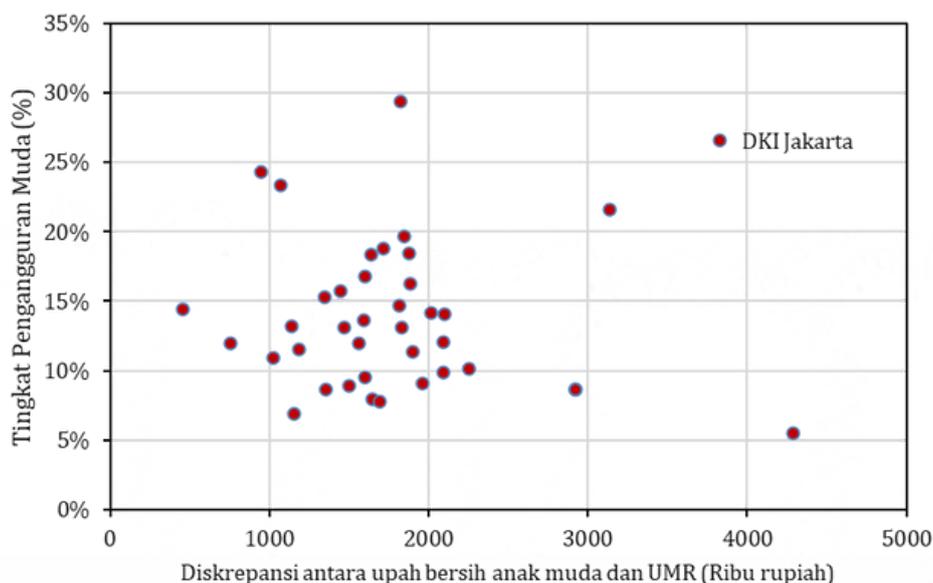
Meskipun tenaga kerja muda yang bekerja di sektor manufaktur jumlahnya relatif konstan sejak 2005, badai PHK yang terjadi di sektor manufaktur sejak 2024 semakin menyempitkan kesempatan tenaga kerja muda mengakses pekerjaan di sektor strategis non-pertanian. Badai PHK awal tahun ini yang dimulai di sektor industri tekstil dan disusul oleh berbagai sektor industri manufaktur baik kecil, menengah, dan besar lainnya telah memukul rumah tangga kelas menengah bawah. Di dalam kelompok pekerja yang terkena PHK tersebut, juga adalah kelompok pekerja anak muda.



Persoalan mendasar pengangguran muda Indonesia berakar pada carut marutnya pembangunan ekonomi sektoral. Dari sisi permintaan, serangkaian badai PHK dan terbatasnya lapangan kerja formal yang relevan dengan keterampilan anak muda adalah problem utamanya. Sementara dari pendulum penawaran, mismatch keterampilan yang ditawarkan anak muda adalah pokok masalahnya.

Selama Agustus 2024 hingga Februari 2025, beberapa lapangan usaha yang menyerap kurang lebih 30,6% total angkatan kerja Indonesia, telah memangkas 1,38 juta tenaga kerja. Secara terperinci, di antaranya adalah industri konstruksi (-0,77 juta orang), industri pengolahan (-0,41 juta orang), aktivitas jasa lainnya (0,20 juta orang), sektor pengangkutan & pergudangan (-0,03 juta orang), aktivitas keuangan & asuransi (-0,05 juta orang), pertambangan & penggalian (-0,09 juta orang), dan real estate (-0,06 juta orang).

Selain itu, suplai lapangan kerja yang layak dan formal begitu terbatas. Dengan kebutuhan ekonomi yang semakin meningkat, anak muda tidak punya pilihan lain selain mengambil pekerjaan yang tersedia. Dengan struktur ekonomi Indonesia yang lebih dari separuhnya digerakkan oleh sektor informal, anak-anak muda pun akhirnya terjebak dalam kubangan informalitas ekonomi. Bahkan, pada Februari 2025, tenaga kerja yang bekerja di sektor informal meningkat 0,23% menjadi 59,40% dibandingkan dengan Februari tahun lalu. Alhasil, 44% anak muda yang aktif bekerja terjebak di sektor informal. Utamanya adalah mereka yang lulusan SMA dan SMK dan/atau yang memiliki latar belakang pendidikan lebih rendah. Konsekuensinya, anak-anak muda yang terjebak di dalam informalitas ini mengantongi gaji di bawah regulasi upah yang disyaratkan (Grafik 2).



Grafik 2. Rata-rata Selisih Upah Diterima Anak Muda dengan UMR dan Tingkat Pengangguran
Sumber: BPS (diolah CORE)

Pada spektrum yang lain, karakteristik utama pengangguran Indonesia yang didominasi oleh lulusan SMK menandakan adanya *mismatch* keterampilan. Dalam beberapa kesempatan, khususnya yang berkaitan dengan spesifik industri tertentu, kurikulum pendidikan vokasi baik di tingkat menengah atas atau di perguruan tinggi masih ada yang belum begitu relevan. Misalnya, pendidikan tampak masih terlalu teoretis dan pelatihan vokasi yang tersedia belum tersambung dengan kebutuhan industri, khususnya sektor industri yang membutuhkan penguasaan teknologi tinggi. Pada saat yang sama, pengembangan *soft skills* dan keterampilan pengelolaan digital berbasis kecerdasan buatan juga belum menjadi prioritas sistem pendidikan kita. Padahal, *soft skills* dan termasuk di dalamnya kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, dan komunikasi adalah keterampilan penting yang dibutuhkan industri saat ini dan masa depan (WEF 2025). Program Kementerian Ketenagakerjaan, seperti *School to Work Transition* untuk anak-anak SMK yang baru-baru ini diluncurkan justru berpotensi tidak efektif. Program ini berpotensi kurang efektif dalam menumpas akar masalah yang ada di kurikulum pendidikan vokasi, yang mana pengaturan kurikulum menjadi wewenang Kemendikbud. Selain itu, program cenderung bersifat jangka pendek. Padahal, pemecahan masalah ketidakcocokan keterampilan anak muda dengan industri membutuhkan program yang berkesinambungan.

Serangkaian persoalan dari sisi permintaan dan penawaran di atas, berpotensi memburuk kedepannya jika pemerintah tidak melakukan reformasi untuk mendorong pembangunan sektor riil dan memperbaiki kualitas suplai tenaga kerja muda Indonesia. Rendahnya akses anak muda ke pasar tenaga kerja yang layak, dan pada saat yang sama adanya ketidakcocokan keterampilan yang ditawarkan anak muda, berpotensi melemahkan produktivitas ekonomi Indonesia. Output per tenaga kerja diperkirakan akan menurun jika tingginya angka pengangguran muda ini terus bertahan dalam satu dekade ke depan.

Lebih lanjut, jika di usia produktif anak muda tidak dapat memperoleh akses pekerjaan yang layak, Indonesia berpotensi ketiban kelompok masyarakat rentan dan miskin yang semakin tinggi. Hilangnya potensi output yang dapat dihasilkan anak muda yang menganggur, jika terakumulasi dalam jangka panjang dapat menyebabkan bencana demografi, dan membuat mesin ekonomi Indonesia kehilangan energi sebelum waktunya.

Kenapa Korea Selatan dan Jerman berhasil sementara Afrika Selatan gagal?

Pada awal 1960-an, Korea Selatan tak ubahnya negara agraris miskin di Asia. Kini, berkat transformasi besar-besaran, negara yang dijuluki "Keajaiban di Sungai Han" ini telah menjelma menjadi kekuatan industri dan teknologi global. Sebaliknya, Afrika Selatan gagal memanfaatkan bonus demografinya, terjebak dalam apa yang disebut sebagai "fatamorgana demografi", kesempatan emas yang berubah menjadi krisis sosial dan ekonomi. Dua pengalaman kontras ini menyimpan pelajaran penting bagi Indonesia yang tengah memasuki periode emas demografi, saat jumlah penduduk usia produktif berada pada puncaknya.

Selama empat dekade, Korea Selatan memaksimalkan bonus demografi dengan strategi jangka panjang yang fokus pada tiga hal: pendidikan berkualitas, investasi besar dalam riset dan pengembangan (R&D), serta industrialisasi berbasis ekspor. Pemerintahnya secara bertahap menggeser fokus industri, dari tekstil (1960-an), ke industri berat dan kimia (1970-an), lalu ke elektronik (1980-an), dengan dukungan kuat dari sistem pendidikan dan pelatihan kerja yang diselaraskan dengan kebutuhan industri. Hasilnya, kontribusi pertumbuhan dari produktivitas total melonjak dari 10% menjadi 60%.

Transformasi Korea Selatan didasarkan pada model "*developmental state*" dengan peran pemerintah yang kuat dan struktur ekonomi yang didominasi oleh chaebol (konglomerat) seperti Samsung, Hyundai, dan LG. Seperti yang ditunjukkan dalam studi Kalinowski (2021), negara ini mengadopsi pendekatan *neo-developmental* dengan kolaborasi erat antara negara dan bisnis. Sementara Jerman, dengan pendekatan berbeda namun sama efektifnya, telah menunjukkan keberhasilan melalui sistem "ekonomi pasar sosial-ekologis" yang berfokus pada *Mittelstand* (UKM spesialis) sebagai tulang punggung ekonomi.

Struktur pemerintahan yang berbeda antara Korea Selatan dan Jerman telah membentuk pendekatan distinktif dalam pengembangan sistem pendidikan masing-masing negara. Kedua negara ini telah berhasil mengembangkan sistem pendidikan vokasi yang menjadi kunci dalam transformasi ekonomi mereka. Jerman unggul dengan pendekatan pendidikan vokasi ganda (*dual vocational education*) yang menjadi model bagi banyak negara. Austria dan Swiss pun menggunakan sistem pendidikan vokasi. Sistem ini memadukan pembelajaran di kelas dengan magang terstruktur di perusahaan, menghasilkan tingkat penyerapan lulusan di dunia kerja mencapai 40-80%.

Pendidikan vokasi ganda (*dual vocational education*) bisa menjadi *game-changer*. Sistem ini menggabungkan pelajaran di kelas dan magang di perusahaan, sehingga membantu 40-80% lulusan sekolah langsung terserap dunia kerja. Keberhasilan model ini ditopang oleh empat faktor kunci: akreditasi nasional, keterlibatan industri dalam kurikulum, pembiayaan bersama antara pemerintah dan perusahaan, serta standar mutu pelatihan yang ketat.

Sebaliknya, Afrika Selatan menunjukkan konsekuensi dari kegagalan merancang kebijakan demografi secara serius. Warisan *Apartheid* membuat sistem pendidikan terbelah dan tidak inklusif. Akibatnya, tingkat pengangguran pemuda mencapai 62,4% untuk usia 15–24 tahun. Ditambah pandemi HIV/AIDS serta tingkat kemiskinan dan ketimpangan yang ekstrem, negara ini kehilangan momentum untuk memanen bonus demografi. *Scarring effect* pun terjadi, anak muda yang menganggur di awal karier cenderung terjebak dalam pekerjaan informal atau pengangguran jangka panjang.

Perbandingan ini menunjukkan pentingnya pendekatan holistik dalam memanfaatkan bonus demografi, yang menggabungkan kebijakan pendidikan, industrialisasi, dan perlindungan sosial yang disesuaikan dengan konteks sosial, ekonomi, dan budaya masing-masing negara. Baik model Korea Selatan yang lebih terpusat maupun pendekatan Jerman yang lebih terdesentralisasi menawarkan pelajaran berharga, sementara kasus Afrika Selatan mengingatkan tentang risiko mengabaikan perencanaan jangka panjang dalam menghadapi transisi demografi.

Catatan Kritis Kebijakan Ketenagakerjaan

Transformasi ekonomi Indonesia mengalami lompatan tidak mulus dari sektor primer ke sektor jasa tanpa melewati fase industrialisasi yang matang. Fenomena yang dikenal sebagai *premature servicization*, telah menciptakan efek domino berupa tingginya pengangguran muda dan stagnasi pertumbuhan ekonomi. Berbeda dari negara maju yang bertahap berpindah dari agraris ke industri lalu jasa, Indonesia melewatkan fondasi penting yang seharusnya dibangun lewat sektor manufaktur.

Sektor jasa yang tumbuh di Indonesia bersifat dualistik, di satu sisi membutuhkan keterampilan tinggi, di sisi lain didominasi pekerjaan informal berupah rendah. Celah ini membuat lulusan SMK dan diploma, yang mayoritas angkatan muda, sulit terserap. Berbeda dengan manufaktur yang memiliki spektrum keterampilan lebih luas dan jenjang karier lebih jelas, sektor jasa yang berkembang seperti *e-commerce*, *fintech*, dan ritel modern cenderung padat modal dan berbasis teknologi, bukan padat karya.

Dampaknya, jutaan anak muda terpaksa masuk ke sektor informal dengan penghasilan rendah dan tanpa jaminan sosial. Sayangnya, respons kebijakan tidak cukup cepat dan tepat sasaran. Program vokasi dan pelatihan pemerintah seperti Balai Latihan Kerja (BLK) menghadapi tantangan serius: kurikulum yang stagnan, minimnya kolaborasi dengan industri, dan tidak adanya skema penempatan kerja yang efektif.

Program seperti Kartu PraKerja pun belum menjangkau kelompok paling rentan, seperti NEET (*Not in Education, Employment, or Training*), akibat kesenjangan akses digital. Akibatnya, pelatihan tidak selalu berujung pada peluang kerja yang nyata.

Lebih jauh, kebijakan industri tidak selaras dengan arah pendidikan dan ketenagakerjaan. Fokus pemerintah pada industri padat modal seperti logam dasar mengabaikan industri padat karya yang lebih potensial menyerap tenaga kerja muda berpendidikan menengah. Ini memperburuk *skills mismatch* dan menjelaskan mengapa meski investasi manufaktur meningkat, pengangguran muda tetap tinggi dan kualitas pekerjaan tidak membaik.

Transformasi ekonomi Indonesia mengalami lompatan tidak mulus dari sektor primer ke sektor jasa tanpa melewati fase industrialisasi yang matang. Fenomena yang dikenal sebagai *premature servicization*, telah menciptakan efek domino berupa tingginya pengangguran muda dan stagnasi pertumbuhan ekonomi.

Menyelaraskan Pendidikan, Industri, dan Regulasi

Indonesia tengah menghadapi tantangan besar dalam menyiapkan angkatan kerja muda untuk menyongsong era baru ekonomi global. Di tengah pesatnya perubahan teknologi, dinamika pasar tenaga kerja, serta peluang bonus demografi yang kian menyempit, reformasi ketenagakerjaan perlu dilakukan secara menyeluruh dan terkoordinasi. Untuk menciptakan sistem ketenagakerjaan yang adaptif, inklusif, dan produktif, dibutuhkan integrasi kebijakan antara pendidikan, investasi, dan regulasi. Beberapa langkah yang diperlukan antara lain;

Pertama, Pemerintah perlu memperkuat implementasi konsep *link and match* antara pendidikan vokasi dan dunia usaha-industri (DUDI) agar tidak berhenti pada level formalitas. Kolaborasi harus diarahkan pada penyelarasan kurikulum berbasis kebutuhan industri, pelatihan instruktur, magang siswa, dan skema rekrutmen yang jelas. Durasi magang sebaiknya diperpanjang dan diarahkan pada penempatan kerja nyata, bukan sekadar pengalaman sesaat. Lembaga vokasi juga perlu didorong menjadikan kemitraan industri sebagai bagian strategis dari operasional harian mereka, bukan program temporer. Untuk mencapai efektivitas jangka panjang, kemitraan harus berbasis komitmen nyata kedua belah pihak. Pemerintah dapat meniru praktik-praktik baik, seperti dukungan pendanaan pelatihan oleh PT Samick, kemitraan langsung BLK Banda Aceh dengan industri lokal, atau inisiatif sektor swasta seperti Samsung Innovation Campus dalam pengembangan kurikulum dan fasilitas.

Kedua, Agar kebijakan *Super Tax Deduction* (STD) Vokasi lebih efektif, pemerintah perlu menyederhanakan mekanisme klaim, memperluas cakupan biaya dan mitra kerja sama, serta memperkuat sosialisasi kepada pelaku industri. Kompleksitas administratif, kurangnya pemahaman, dan ketidaksesuaian insentif dengan prioritas bisnis perusahaan telah menghambat pemanfaatan skema ini. Untuk itu, dibutuhkan pendampingan teknis, integrasi sistem pelaporan digital, serta penambahan insentif non-fiskal seperti status mitra strategis. Dengan pendekatan yang lebih responsif dan kolaboratif, STD Vokasi dapat menjadi katalisator peningkatan peran sektor swasta dalam pengembangan vokasi yang relevan dan berkelanjutan.

Ketiga, Pemerintah perlu memperkuat koordinasi dan tata kelola ketenagakerjaan usia muda secara menyeluruh. Upaya ini mencakup peningkatan sinergi antar kementerian dan pemerintah daerah dalam perencanaan serta implementasi kebijakan terkait seperti vokasi, penyusunan regulasi yang lebih harmonis untuk memperjelas peran masing-masing pemangku kepentingan, serta pengembangan platform terpadu yang menyediakan informasi kebutuhan pasar kerja, program pelatihan, dan peluang kolaborasi antara lembaga vokasi dan dunia industri.

Keempat, strategi investasi nasional perlu dikalibrasi ulang agar tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga secara nyata mendorong penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi kelompok muda. Selama ini, tren investasi cenderung mengarah pada sektor padat modal yang minim kontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja. Sektor pertanian, misalnya, jika dikembangkan dari hulu ke hilir dapat menjadi solusi konkret untuk mengurangi pengangguran pemuda di pedesaan. Penggunaan teknologi, akses pembiayaan, serta skema kemitraan berbasis agribisnis perlu diperkuat untuk menjadikan sektor ini lebih menarik dan berkelanjutan bagi generasi muda. Di sisi lain, pengembangan sektor pariwisata dapat menjadi sumber pertumbuhan lokal yang padat karya, jika dikembangkan secara inklusif dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah.

Penyelarasan antara pendidikan, dunia usaha, dan kebijakan pemerintah bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Tanpa harmonisasi yang sistemik, Indonesia berisiko kehilangan momentum bonus demografi yang hanya datang sekali dalam sejarah. Peluang emas ini hanya akan menghasilkan dividen jika didukung oleh ekosistem ketenagakerjaan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada masa depan. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor harus dipandang sebagai investasi jangka panjang untuk memastikan generasi muda tidak hanya memiliki pekerjaan, tetapi juga masa depan yang layak dan produktif.

Narahubung Publikasi dan Kerjasama

📞 Emma Efidayanti
0813-1408-0397



Tanpa harmonisasi yang sistemik, Indonesia berisiko kehilangan momentum bonus demografi yang hanya datang sekali dalam sejarah.

Daftar Pustaka

Eichhorst W, Rodríguez-Planas, N, Schmidl, R, and Zimmermann, KF (2015) 'A road map to vocational education and training in industrialized countries'. *ILR Review*, 68(2):314-337.

Lee JW and Song E (2025) 'Demographic change and long-term economic growth path in Asia'. *Economic Modelling* (147):107043.

Pratomo DS and Manning S (2020) 'Structural change in and formal sector employment growth in Indonesia', *Working Paper No. 2020/15*, Crawford School of Public Policy, ANU.

World Economic Forum (2025) *Future of Jobs Report 2025*. WEF: Geneva.

Sumber Gambar

Foto dari zhang kaiyv di Unsplash, Foto dari Quang Huy Nguyễn di Unsplash, <https://www.freepik.com/free-vector/gradient-stock-market-concept>, Canva Foto Ache Surya, Canva Foto Yamtono_Sardi, Canva Foto Velvetfish



Canva foto - Ache Surya

PENANGGUNG JAWAB

Mohammad Faisal, Ph.D

PENASIHAT

Akhmad Akbar Susanto, Ph.D

Prof. Dr. Sahara, S.P., M.Si.

Dr. Etika Karyani

Muhammad Ishak Razak, M.A

PENULIS

Yusuf Rendy Manilet, M.Ec.Dev

Azhar Syahida, MIntDevEc

Eliza Mardian, S.P.,M.S.P

ASISTEN PENELITI

Irzal Eka Saputra

M. Fathur Rahman

DESAIN

Nando Purnama Aji